Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang)

Bonaraja Purba¹, Siti Alifah Handayani², Lutfia Nur Azizah³, Juan Charlos Sibarani⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

e-mail: bonarajapurba@gmail.com¹, sitalifa212018@gmail.com²,
lutfiahnzizah@gmail.com³, sibaranijuan61@gmail.com⁴

Abstrak

Perdagangan internasional merupakan sarana untuk melakukan pertukaran barang dan jasa internasional, dan kebijakan perdagangan internasional ditetapkan oleh negara-negara baik maju maupun berkembang. Faktor politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam kebijakan perdagangan internasional, baik dalam hal perlindungan industri dalam negeri, mendorong ekspor, maupun hak istimewa bagi negara berkembang. Isu-isu global juga memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju, seperti perdagangan bebas, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Namun, negara maju juga menghadapi tantangan dalam mengelola hubungan perdagangan internasional, termasuk keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan politik domestik serta tekanan dari negara berkembang. Faktor politik juga mempengaruhi arah dan keberhasilan perdagangan internasional suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang politik dalam perdagangan internasional sangat penting dalam pembentukan kebijakan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi suatu negara.

Kata kunci: *Negara Maju, Negara Berkembang, WTO*

Abstract

International trade is a means for exchanging international goods and services, and international trade policies are determined by both developed and developing countries. Political factors have a significant influence on international trade policy, both in terms of protecting domestic industry, encouraging exports, and privileges for developing countries. Global issues also play an important role in the formation of international trade policies by developed countries, such as free trade, sustainable development, and environmental protection. However, developed countries also face challenges in managing international trade relations, including balancing domestic economic and political interests and pressure from developing countries. Political factors also influence the direction and success of a country's international trade. Therefore, a good understanding of politics in international trade is very important in forming sustainable and profitable policies for a country.

Keywords : *Developed Countries, Developing Countries, WTO*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan ini dilakukan oleh perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah atau badan suatu negara atau pemerintah atau badan suatu negara dengan pemerintah atau badan dari negara lain. Di beberapa negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP (Gross Domestic Product) yang merupakan jumlah nilai produk berupa

barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun (Andri Feriyanto, 2015). Perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Dalam konteks global, kebijakan perdagangan internasional ditetapkan oleh negara-negara baik maju maupun berkembang. Namun, kebijakan perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor politik yang kuat.

Negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan dalam hal kekuatan politik dan ekonomi. Banyak kasus menunjukkan, isu-isu politik menjadi penghambat hubungan atau diplomasi ekonomi yang dimiliki negara (Fahrizi, 2015). Negara maju umumnya memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar di arena internasional, sementara negara berkembang cenderung memiliki keterbatasan dalam hal ini. Perbedaan ini mempengaruhi cara negara-negara tersebut mempengaruhi dan membentuk kebijakan perdagangan internasional. Negara maju seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dalam kebijakan perdagangan internasional dibandingkan dengan negara berkembang. Negara maju cenderung melindungi industri dalam negeri mereka dan mendorong ekspor produk-produk mereka. Mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi regulasi dan perjanjian perdagangan internasional sesuai dengan kepentingan mereka. Di sisi lain, negara berkembang seringkali menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam hal perdagangan internasional. Mereka mungkin memiliki industri yang masih lemah, kurangnya sumber daya, atau masalah lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang sering membutuhkan perlindungan khusus dalam kebijakan perdagangan internasional.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan badan internasional yang mengatur perdagangan antara negara-negara berdasarkan aturan dan prinsip yang adil. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki peranan penting dalam WTO. Mereka memiliki hak untuk menerima perlakuan istimewa dan berbeda sebagai kompensasi terhadap keterbatasan dan kelemahan ekonomi dan perdagangan mereka. Dalam proses perumusan peraturan perdagangan WTO, seringkali negara berkembang harus berhadapan dengan negara maju. Posisi negara berkembang dan negara maju seringkali tidak setara (Mariane Delanova, 2016). Posisi negara-negara berkembang dalam WTO memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam negosiasi kebijakan perdagangan internasional dan secara aktif mempengaruhi aturan dan kebijakan perdagangan global. Namun, negara-negara berkembang juga harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh WTO dan berpartisipasi dalam proses negosiasi untuk mencapai tujuan perdagangan internasional yang adil dan seimbang.

Pada era globalisasi saat ini, perdagangan internasional memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Globalisasi di bidang ekonomi sebagai dampak yang paling menonjol di bidang ekonomi semakin besar dan meluasnya pasar Internasional. Kebebasan pasar Internasional dalam hal ini era pasar bebas membuka peluang kerja yang sangat luas, meningkat pendapatan suatu negara serta dampak baik lainnya (Mastriati Hini Hermala Dewi, 2019). Kebijakan perdagangan internasional yang efektif dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan investasi asing, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas industri. Namun, proses pembentukan kebijakan perdagangan internasional tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor politik.

Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana peran politik dalam mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional pada negara maju dan juga negara berkembang. Politik memiliki pengaruh yang besar juga dalam penentuan kebijakan ini, dan bagaimana perbedaan politik negara maju dan juga negara berkembang..

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan dalam penelitian pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan triangulasi, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda (Sugiyono 2022). Dalam penelitian ini peneliti

mendeskripsikan mengenai perbandingan pendekatan politik antara negara maju dan berkembang dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional serta bagaimana implikasinya terhadap pembentukan kebijakan perdagangan internasional. Kemudian, data yang diperoleh disajikan kedalam bentuk deskripsi kata-kata agar lebih mudah dipahami.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2022) data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang sebelumnya telah tersedia seperti hasil penelitian sebelumnya, dokumen resmi, dan data statistik yang digunakan untuk mendukung penelitian atau analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, pengumpulan data dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa masalah yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan tambahan dari metode observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional Negara Maju

Salah satu aspek penting dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju adalah pengaruh politik domestik. Politik domestik seringkali menjadi faktor utama yang memengaruhi kebijakan perdagangan suatu negara. Para pemimpin politik di negara maju harus mempertimbangkan kepentingan dalam negeri mereka, termasuk kepentingan ekonomi dan politik, dalam mengambil keputusan tentang perdagangan internasional. Perilaku demokratis merupakan pencerminan dari budaya politik nasional atau negara (Herning Suryo, 2015). Misalnya, pemilihan umum, tekanan dari kelompok lobi industri, dan pandangan masyarakat akan berdampak pada kebijakan perdagangan. Dalam beberapa kasus, politik domestik dapat membatasi fleksibilitas negara maju dalam membuka pasar mereka atau mengadopsi kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri. Sebaliknya, jika pemimpin politik merasa ada keuntungan ekonomi yang besar dalam memperluas perdagangan internasional, mereka dapat mengambil pendekatan yang lebih liberal terhadap perdagangan.

Selain politik domestik, kepentingan ekonomi juga merupakan faktor kunci dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju. Negara maju umumnya memiliki ekonomi yang kuat dan bergantung pada perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Daya saing internasional suatu negara didasari pada keunggulan teknologi, produktivitas tenaga kerja, upah riil, dan tingkat relatif keterbukaan perdagangan (Natalis Christian et al., 2022). Oleh karena itu, mereka memiliki insentif untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan mereka mendukung kepentingan ekonomi nasional. Hal ini bisa berarti membuka pasar domestik mereka untuk barang dan jasa asing atau mencari akses ke pasar luar negeri. Negara maju juga sering berupaya untuk mengamankan kondisi perdagangan yang adil dan saling menguntungkan, termasuk mempromosikan perlindungan hak kekayaan intelektual, penghapusan hambatan perdagangan, dan memastikan akses yang adil ke pasar global. Keputusan ekonomi yang diambil oleh negara maju dalam konteks perdagangan internasional akan sangat mempengaruhi hubungan perdagangan global dan kesejahteraan ekonomi nasional dan global secara keseluruhan.

Isu-isu global juga memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju. Negara maju seringkali terlibat dalam berbagai forum internasional dan perjanjian perdagangan regional yang mempengaruhi aturan perdagangan global. Mereka berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu dalam perdagangan internasional, seperti perdagangan bebas, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, mereka sering berperan sebagai inisiator dalam perundingan perdagangan multilateral, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan berupaya untuk mempengaruhi perkembangan aturan perdagangan global sesuai dengan kepentingan mereka. Misalnya, negara maju dapat meminta perjanjian perdagangan yang memasukkan ketentuan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual atau penghapusan subsidi pertanian, yang sesuai dengan kepentingan mereka. Semua kebijakan perdagangan baik di luar maupun di dalam negeri

harus memiliki arah yang sama dalam meningkatkan penerimaan negara dengan maksud meningkatkan kesejahteraan negara (Resitaka Aulia Nurmamurti et al., 2022).

Negara maju juga seringkali berusaha untuk memainkan peran utama dalam mengatasi isu-isu global yang berkaitan dengan perdagangan, seperti perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan. Mereka dapat menggunakan kebijakan perdagangan mereka sebagai alat untuk mempromosikan agenda-agenda ini. Misalnya, mereka dapat memberikan insentif perdagangan kepada negara-negara yang mengadopsi kebijakan ramah lingkungan atau berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini menciptakan hubungan antara perdagangan internasional dan isu-isu global yang semakin penting dalam pembentukan kebijakan perdagangan oleh negara maju.

Namun, meskipun negara maju memiliki kepentingan ekonomi yang besar dalam perdagangan internasional dan seringkali berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu, mereka juga menghadapi tantangan dalam mengelola hubungan perdagangan internasional. Salah satu tantangan utama adalah keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan politik domestik. Pemimpin politik harus menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dalam negeri yang mungkin mendukung proteksionisme dengan kepentingan ekonomi nasional yang lebih luas yang mendorong liberalisasi perdagangan. Ini bisa menjadi dilema politik yang kompleks.

Negara maju juga dihadapkan pada tekanan dari negara-negara berkembang yang seringkali memperjuangkan akses yang lebih besar ke pasar negara maju. Negara-negara berkembang memandang negara maju sebagai pemain dominan dalam perdagangan internasional dan seringkali menuntut perubahan dalam peraturan perdagangan yang menguntungkan mereka. Negara maju harus menanggapi tuntutan ini dengan bijaksana, mengambil tindakan yang mempromosikan perdagangan yang lebih adil sambil melindungi kepentingan ekonomi nasional mereka.

Keadaan geopolitik negara maju sebenarnya sangat rendah dibandingkan dengan negara berkembang dimulai dari sumber daya alam, tetapi dengan kemajuan yang dicapai negara-negara berkembang dalam bidang teknologi dan informasi menjadikannya menjadi negara yang maju (Azwar Rahmat, 2021). Ketidakpastian geopolitik juga dapat menjadi tantangan dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju. Ketegangan politik antara negara-negara dapat memengaruhi perdagangan internasional dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan pasar global. Negara maju harus berurusan dengan konflik geopolitik dan mencari solusi yang memungkinkan perdagangan internasional tetap berjalan lancar.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, negara maju seringkali berupaya untuk memainkan peran aktif dalam forum-forum internasional, seperti WTO, untuk mempromosikan kepentingan mereka dan berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam mencari solusi untuk masalah perdagangan global. Mereka juga dapat mencari kemitraan perdagangan regional untuk memperkuat posisi ekonomi mereka dalam perdagangan internasional.

Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional Negara Berkembang

Peran politik negara berkembang dalam diplomasi internasional semakin penting seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa faktor yang mendorong peran ini menjadi lebih signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara-negara berkembang telah memberikan mereka lebih banyak daya tawar dalam perundingan internasional. Ekonomi yang kuat memungkinkan mereka untuk menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan pembiayaan pembangunan. Negara-negara seperti China dan India kini menjadi kekuatan ekonomi global yang sangat berpengaruh, dengan potensi untuk membentuk aturan-aturan perdagangan internasional. Sementara perjanjian perdagangan bebas memberikan janji bahwa liberalisasi pasar dalam negeri akan membawa teknologi baru, persaingan usaha sehingga industri dalam negeri akan lebih efisien sehingga industri dalam negeri akan tumbuh secara pesat. Berdasarkan hal inilah negara-negara berkembang bersedia untuk melakukan perundingan perdagangan internasional dan membuka jalan bagi negara-negara industri maju untuk mengambil keuntungan dari keterbukaan pasar global (Sunu, 2020).

Populasi yang besar di negara-negara berkembang juga menjadi faktor penting dalam peningkatan peran politik mereka. Populasi yang besar berarti adanya pangsa pasar yang besar untuk produk dan jasa, serta tenaga kerja yang melimpah. Hal ini membuat negara-negara berkembang menjadi destinasi investasi yang menarik dan mitra perdagangan yang signifikan bagi negara-negara maju. Kemudian, isu-isu global yang semakin kompleks dan saling terkait juga memerlukan peran politik yang kuat dari negara-negara berkembang. Bagi negara-negara Dunia Ketiga, isu-isu yang terkait dengan ancaman keamanan dalam bentuk baru (Human Security) ini merupakan “ancaman keamanan yang nyata” karena memiliki relevansi dengan kondisi domestik Negara-negara Dunia Ketiga yang masih disibukkan oleh berbagai persoalan mengenai: 1) Situasi transisi politik; 2) Lemahnya kekuasaan pemerintah akibat tidak maksimalnya upaya penegakan hukum; 3) Ketidakpastian politik; 4) Krisis ekonomi; 5) Masalah konflik di wilayah perbatasan; 6) Konflik etnis dan konflik komunal dengan berbagai dimensi internasionalnya; 7) Persoalan disintegrasi bangsa; 8) Peningkatan jumlah pelaku terorisme; 9) Kemampuan melakukan tindakan ancaman terhadap human security, dsb (Amaritasari, n.d.). Kebutuhan akan kerja sama internasional dalam menangani masalah-masalah ini mendorong negara-negara berkembang untuk berperan aktif dalam merumuskan solusi bersama dan mengadvokasi kepentingan mereka dalam perundingan global.

Pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang adalah suatu proses yang sangat kompleks dan penuh dengan tantangan. Kebijakan perdagangan memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara tersebut. Namun, di balik kebijakan perdagangan yang terlihat pada permukaan, terdapat dinamika politik yang kuat yang memengaruhi setiap langkah dalam proses pembentukan kebijakan tersebut.

Kebijakan perdagangan internasional sering kali mencerminkan pandangan politik pemerintah yang berkuasa. Pemerintah yang lebih condong pada liberalisasi perdagangan akan cenderung menerapkan kebijakan perdagangan yang mendukung akses pasar yang lebih terbuka dan mengurangi hambatan perdagangan. Liberalisasi ekonomi yang dicirikan dalam perspektif neoliberal memungkinkan semua partisipan dalam perdagangan bebas untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat negara atau aktor tersebut mampu meningkatkan daya saingnya dalam percaturan dan perdagangan global (Randy Aulia Isan, 2017). Di sisi lain, pemerintah yang lebih proteksionis akan cenderung menerapkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri dan memberikan keuntungan kompetitif bagi produsen lokal. Oleh karena itu, perubahan dalam pemerintahan dapat berdampak signifikan pada kebijakan perdagangan internasional. Stabilitas politik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional yang konsisten dan terprediksi. Negara dengan stabilitas politik yang baik cenderung memiliki kebijakan perdagangan yang lebih kohesif dan terarah. Sebaliknya, negara dengan ketidakstabilan politik dapat menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang konsisten dan dapat menghambat pertumbuhan perdagangan internasional.

Hubungan diplomatik dengan negara lain juga memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang. Negara berkembang yang memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain cenderung dapat memperoleh dukungan dan bantuan dalam upaya mempromosikan kebijakan perdagangan yang menguntungkan. Misalnya, negara berkembang yang memiliki hubungan yang kuat dengan negara maju dapat memperoleh akses pasar yang lebih terbuka dan memperoleh bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas perdagangan. Sebaliknya, negara dengan hubungan diplomatik yang tegang dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan dan akses pasar yang lebih terbuka.

Faktor-faktor politik lainnya juga mempengaruhi pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang. Ideologi politik, seperti nasionalisme ekonomi atau neoliberalisme, dapat membentuk pandangan dan pendekatan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Selain itu, pengaruh kelompok kepentingan, baik dari sektor bisnis, buruh, maupun masyarakat sipil, juga dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional melalui tekanan politik yang mereka hasilkan. Faktor-faktor politik ini dapat menciptakan dinamika yang kompleks dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang.

Selanjutnya, tekanan internasional juga dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang. Negara berkembang sering kali menghadapi tekanan dari negara-negara maju atau lembaga internasional untuk membuka pasar mereka dan mengadopsi kebijakan perdagangan yang lebih liberal. Tekanan ini dapat mendorong negara berkembang untuk mengubah atau menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka. Namun, negara berkembang juga dapat menggunakan faktor politik ini untuk melindungi kepentingan nasional mereka dan mempertahankan kebijakan yang lebih proteksionis. Walaupun begitu, menurut Sunu (2020) menyatakan bahwa negara berkembang masih membutuhkan negara maju dalam bantuan teknis maupun ekonomi.

Negara-negara berkembang juga memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses pembentukan kebijakan perdagangan internasional. Negara-negara berkembang yang termasuk dalam anggota WTO memiliki kursi dan hak suara di dalam forum WTO dan dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional. Pada saat yang sama, negara-negara berkembang juga diharapkan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh WTO dan berpartisipasi dalam proses negosiasi. Menurut Aam Slamet Rusydiana menyatakan bahwa anggota WTO sekarang harus mematuhi sepenuhnya perjanjian-perjanjian ini pada dasarnya mengharuskan mereka untuk meliberalisasi perekonomian mereka secara terprogram, disiplin, terbatas, progresif dan komprehensif. Artinya perekonomian negara-negara berkembang harus sepenuhnya menyesuaikan kegiatan ekonominya dengan mekanisme pasar bebas dan liberalisme ekonomi.

Perbedaan Pendekatan Politik antara Negara Maju dan Berkembang dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional

Perbedaan dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional sangat terlihat antara negara maju dan berkembang. Hal ini karena adanya pandangan yang berbeda antara negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang cenderung akan mengambil kebijakan yang akan menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing, terutama dari negara maju. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk melindungi lapangan kerja, untuk memproteksi skala kecil dalam negeri, dalam rangka memperkuat pelaku usaha nasional, hingga mendapatkan devisa. Sedangkan negara maju menghendaki agar tidak ada hambatan yang diberlakukan oleh negara, termasuk yang diberlakukan oleh negara berkembang. Tidak adanya hambatan diidentikkan dengan perdagangan bebas (free trade) yang berarti tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal. Pasarmenjadi penting karena produk yang diberlakukan pelaku usaha dari negara maju harus dibeli (Gaffar, n.d.).

Selain itu terdapat perbedaan lain yang mencakup berbagai aspek, seperti prioritas kebijakan, strategi negosiasi, dan pandangan tentang peran pemerintah dalam perdagangan internasional. Seperti dalam hal prioritas dan tujuan dimana negara maju cenderung memiliki prioritas untuk mempromosikan kepentingan ekonomi dan perusahaan mereka di pasar internasional. Mereka sering mengedepankan liberalisasi perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan, dan memperluas akses pasar untuk ekspor mereka. Sedangkan negara berkembang memiliki prioritas yang berbeda, seperti melindungi industri dalam negeri mereka yang masih berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan keamanan pangan dan kedaulatan ekonomi negara. Mereka mungkin lebih cenderung mendukung perlindungan perdagangan atau kebijakan perdagangan yang lebih berorientasi ke dalam negeri.

Lalu dalam aspek posisi tawar menawar, negara maju cenderung memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar dalam perundingan perdagangan internasional. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih aktif dalam menentukan aturan perdagangan global dan mendorong negosiasi yang mendukung kepentingan mereka. Sedangkan negara berkembang seringkali memiliki posisi tawar menawar yang lebih lemah dalam perundingan perdagangan internasional. Mereka mungkin bergantung pada dukungan dan bantuan dari negara-negara maju, dan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mempengaruhi hasil negosiasi.

Dilihat dari regulasi dan keterlibatan pemerintah, negara maju sering mendorong deregulasi dan keterlibatan pemerintah yang lebih sedikit dalam ekonomi. Mereka lebih cenderung mendukung pasar bebas dan berusaha untuk mengurangi hambatan perdagangan. Sedangkan,

negara berkembang sering memiliki keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam ekonomi, terutama untuk melindungi sektor-sektor strategis dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Mereka dapat menerapkan berbagai instrumen kebijakan, seperti tarif, kuota, dan subsidi.

Negara maju cenderung membentuk atau menjadi bagian dari anggota perdagangan regional, seperti Uni Eropa atau NAFTA (sekarang USMCA), untuk memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional. Negara berkembang juga dapat membentuk blok regional mereka sendiri, seperti ASEAN atau MERCOSUR, Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam perundingan perdagangan dan meningkatkan akses pasar regional. Namun, bukan berarti negara berkembang hanya bisa gabung kedalam aliansi regional mereka saja, bisa saja bagi negara berkembang untuk gabung kedalam organisasi perdagangan dunia seperti WTO. Keanggotaan WTO terbanyak berasal dari negara berkembang. Mereka memainkan peran sangat aktif dan penting di WTO karena jumlahnya yang banyak, peranan mereka menjadi lebih penting dalam ekonomi global, karena negara berkembang semakin melihat perdagangan sebagai alat vital dalam usaha pembangunan negaranya.

Negara berkembang terdiri memiliki kelompok dan setiap kelompok dengan permasalahan yang berbeda. Status negara berkembang di WTO memiliki hak-hak khusus. Beberapa ketentuan dalam beberapa Perjanjian WTO memberi negara berkembang masa transisi yang lebih lama sebelum mereka diwajibkan untuk sepenuhnya melaksanakan kesepakatan juga mereka dapat menerima bantuan teknis. Anggota WTO yang mengumumkan dirinya sebagai negara berkembang tidak secara otomatis mendapat keuntungan dari beberapa anggota negara maju seperti dalam prinsip General System of Preference (GSP) (Nita Anggraeni, 2019).

Keanggotaan negara berkembang mendapat perhatian WTO karena tujuan WTO sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi anggotanya dan mayoritas anggota WTO adalah negara berkembang. Dengan berbagai permasalahan negara berkembang membentuk koalisi dan terjadi negosiasi-negosiasi untuk memecahkan permasalahan antar anggota (Nita Anggraeni, 2019). Maka dengan hadirnya WTO, negara berkembang dapat mempertahankan haknya yang dilanggar dan dapat memaksa negara maju untuk melakukan perundingan. Tersedianya pilihan untuk mengajukan gugatan hukum yang memberikan kekuatan pada negara berkembang memaksa negara maju dalam kasus tertentu.

SIMPULAN

Politik memiliki peran besar dalam membentuk kebijakan perdagangan internasional, dipengaruhi oleh ideologi politik, kelompok kepentingan, tekanan internasional, dan tata kelola pemerintahan. Negara maju lebih dipengaruhi oleh kompleksitas politik domestik dan hubungan internasional, sementara negara berkembang menghadapi tantangan lebih besar terkait faktor politik. Perbedaan pendekatan kebijakan perdagangan terlihat, dimana negara maju mendorong liberalisasi dan memperluas akses pasar, sedangkan negara berkembang lebih fokus pada perlindungan industri dan penciptaan lapangan kerja. Saat ini penting untuk memahami peran politik dalam kebijakan perdagangan. Keputusan politik berpengaruh besar pada arah dan keberhasilan perdagangan internasional suatu negara, sehingga mempertimbangkan faktor politik menjadi kunci dalam pengambilan keputusan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. (2020). *EKONOMI INTERNASIONAL*.
- Amaritasari, I. P. (n.d.). *Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional*.
- Andri Feriyanto. (2015). *Perdagangan Internasional "Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor"*. PT. Pusaka Baru.
- Anugrah Dwi. (2023, August 15). *Kebijakan Perdagangan Internasional*.
- Azwar Rahmat. (2021). *KONSEPPERBANDINGANGEOPOLITIK, SOSIALBUDAYADANEKONOMINEGARA-NEGARAMAJUDAN NEGARABERKEMBANG*. *Jurnal Edukasia Multikultural*, 3(1).
- Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, & Ardha Utama. (2021). *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. Bumi Aksara.

- Erna S Widodo. (2017). IDEOLOGI UTAMA DALAM EKONOMI POLITIK GLOBAL ANTARA MERKANTILISME DAN LIBERALISM. *Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganessa*, 1(1).
- Fahrazi, M. (2015). INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN (Perspektif Politik dan Budaya Hukum). In *Jurnal Yuridis* (Vol. 2, Issue 2).
- Gaffar, J. M. (n.d.). *Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional*. <http://www.negarahukum.com/hukum/sikap-negara-negara-berkembang-terhadap->
- Herning Suryo. (2015). BUDAYA POLITIK NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG: SUATU PERBANDINGAN . *Transformasi*, 1.
- Indri Riesfandiari, Ario Seno Nugroho, & Imam Tri Wahyudi. (2021). DAMPAK SAFEGUARD ATAS IMPOR BENANG TERHADAP PEREKONOMIAN: PENDEKATAN MODEL CGE . *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* , 5(2).
- Laode Muhamad Fathun. (2017). PROTEKSIONISME SENGKETA DAGANG DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PENDEKATAN NEGOSIASI STUDI KASUS: PROTEKSIONISME AS TERHADAP IMPOR DAGING KANADA . *Jurnal Asia Pacific Studies* , 1(1).
- Mariane Delanova. (2016). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara-negara Berkembang dalam G33 untuk Mempromosikan Proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism. *Dinamika Global*, 1(1).
- Mastriati Hini Hermala Dewi. (2019). ANALISA DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Jurnal Ekonomia*, 9(1).
- Natalis Christian, bNatasya Des T.G, & Josephine Ardini Yaputri. (2022). KAJIAN PENGARUH SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA: NASIONAL DAN INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2).
- Nita Anggraeni. (2019). PERANG DAGANG DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL . *Al -Ahkam* , 15(1).
- Paul R. Krugman, & Maurice Obstfeld. (1991). *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (2nd ed.). PAU-FE Universitas Indonesia dan Harper Collins.
- Qomarudin. (n.d.). Kajian Tarif Impor dan Kinerja Kebijakan Harga Dasar Terhadap Daya Saing di Pasar Dunia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 2010.
- Randy Aulia Isan. (2017). KEPENTINGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK DALAM PEMBENTUKAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP). *JOM FISIP*, 4(1).
- Resitaka Aulia Nurmamurti, Anisa Yuniar Faradilla, Al Imam Rismanto, Syifa Nur Afifah, Aliya Hamida, & Kenya Hilda Sar. (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri Trump: Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat - China . *SOSPOLI*, 2(1), 62–70.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunu, A. P. (2020). Perdagangan Internasional sebagai Aspek Kedua dan Ketiga dari Power. *Padjajaran Journal of International Relations*, 2(1), 3–17. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1>